KEDUDUKAN HUKUM PJTKI DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUAR NEGERI (STUDY DI PT. BIJAK)





OLEH:

LAELA NURMALA SAHRUNI NPM: 0288/0088/FH/07

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G
2006

KEDUDUKAN HUKUM PJTKI DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUAR NEGERI (STUDY DI PT. BIJAK)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

LAELA NURMALA SAHRUNI NPM: 0288/0088/FH/07

Pembimbing Utama

(JOHAN MALIGAN, SH)

Pembimbing Rendamping

(TAMRIN, SH.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G
2006

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Kedudukan PJTKI adalah sebagai penyalur tenaga kerja yang mana haknya adalah mendapatkan kompensasi berupa pembayaran dari calon TKI yang diberangkatkan dan disisi lain mendapatkan kompensasi dari job order yang diterimanya.
- 2. Bentuk dari perjanjian terbagi atas dua yaitu perjanjian penempatan yang ditandatangani oleh calon TKI dan PJTKI yang bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap penempatan kerja dari calon TKI namun dalam hal ini perjanjian penempatan tidak digunakan oleh PT. Bijak dan yang kedua adalah perjanjian kontrak kerja bersama yang ditandatangani oleh calon TKI dengan pengguna jasa di Luar Negeri.
- Perlindungan hukum terhadap TKI secara sosiologis masih sangat kurang dimana masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh TKI baik dari masa pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan yang sangat merugikan TKI.